



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Dipilih oleh Penulis

DATA	SKRIPSI	TESIS
Nama Peneliti, Tahun, NIM, Program Studi	Gusti Putu Mahardika, 2013, 09120110067, Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara.	Fathurin Zen, 2001, 8398130075, Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia.
Judul	Konstruksi Berita Konflik Penyerangan Mapolres OKU (Ogan Komering Ulu) Oleh Anggota TNI Dalam Surat Kabar <i>Kompas</i> dan <i>Tempo</i> (Analisis <i>Framing</i> Berita Penyerangan Mapolres OKU Oleh Anggota TNI Dalam Surat Kabar <i>Kompas</i> dan	Komunikasi Dan Konflik Politik Antara Kelompok Islam Tradisional dan Modern (<i>Framing</i> Analysis Terhadap Berita-berita Mengenai Nahdlatul Ulama Dalam Media Cetak).

	<i>Tempo</i> 8- 13 Maret 2013).	
Perbedaan dengan penelitian penulis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada perbedaan dalam pemilihan kasus. 2. Selain <i>Kompas</i>, memilih media <i>Tempo</i> untuk diteliti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan <i>framing analysis</i> model Pan dan Kosicki. 2. Selain <i>Kompas</i> dan <i>Republika</i>, memilih media <i>Duta Masyarakat Baru</i> dan <i>Media Indonesia</i>, sekaligus 16 berita menjadi bahan untuk dianalisis.
Persamaan dengan penelitian penulis	<ol style="list-style-type: none"> 3. Teknik analisis yang digunakan <i>framing</i> model Robert M. Entman. Sifat penelitian ini deskriptif dengan metode analisis isi 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengangkat topik utama membahas tentang NU dengan paradigma konstruktivis, tipe penelitian kualitatif. Walaupun kasus

	<p>kualitatif, dan paradigma konstruktivis.</p>	<p>yang dibahas berbeda. Kasus yang dibahas tentang komunikasi dan konflik politik yang dilakukan tokoh NU, terutama Gus Dur.</p>
--	---	---

Skripsi yang diambil sebagai penelitian terdahulu membahas tentang Konflik antara dua institusi Negara, yaitu Mapolres OKU dengan TNI. Berita ini dianggap selalu terjadi sepanjang 10 tahun terakhir dan selalu mendapat perhatian dari media, tak terkecuali surat kabar. Penelitian ini difokuskan pada berita tentang penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI dalam harian *Kompas* dan *Tempo* pada tanggal 8 Maret – 13 Maret 2013.

Tentunya berbeda dengan kasus yang dipilih penulis saat ini. Penulis memilih kasus ricuhnya pemilihan rais aam dalam muktamar ke-33 di harian *Kompas* dan *Republika*. Penulis melihat dari sudut pandang Indonesia sebagai mayoritas penduduk Islam. Seharusnya sebagai ormas terbesar di dunia dan memiliki banyak pengikut, perbedaan pendapat bisa diatasi dengan baik.

Tesis yang diambil sebagai penelitian terdahulu membahas tentang berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa yang dianggap para elit politik NU yang memiliki keinginan untuk menjawab kehendak warganya di satu sisi di samping keinginan mereka sendiri untuk terjun langsung ke dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Namun, keadaan ini membuat pertentangan dan manuver politik antara ketiga kelompok kekuatan massa, yaitu kaum nasionalis, tradisional, dan modernis. Topik utama tertuju pada NU, sama dengan pilihan topik utama yang ditulis oleh penulis saat ini.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Teori Konstruksi Sosial atas Realitas

Pendekatan konstruksi sosial atas realitas Berger dan Luckmann adalah sebuah proses yang terjadi secara alamiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah komunitas primer dan semi-sekunder (Bungin, 2006, h.206). Konstruksi juga didasari dari pemahaman dan pengetahuan tentang dunia yang dilihat dari lingkungan hidup sosial manusia dengan subjektivitasnya yang diyakini memiliki dasar pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing individual (Berger & Luckmann, 1966, h.33).

Teori ini mengarah kepada masyarakat transisi-modern di Amerika sekitar tahun 1960-an yang belum mengenal media massa dan menjadikan sebuah fenomena menarik untuk dibicarakan. Oleh karena itu teori konstruksi realitas

sosial atas realitas Berger dan Luckmann tidak memasukkan media massa sebagai fenomena yang berpengaruh dalam konstruksi sosial atas realitas (Bungin, 2006, h.206).

Namun, pada kenyataannya konstruksi sosial atas realitas berlangsung begitu lambat dan membutuhkan waktu lama dalam menjalankannya sehingga membuat teori ini tak mampu lagi menjawab perubahan zaman transisi-modern di Amerika karena masyarakat membutuhkan media massa dalam hidupnya (Bungin, 2006, h.206-207).

Selain itu, terdapat Littlejohn dan Foss (2009, dikutip dalam Jokomono, 2013, h.79) yang menyebut Jesse Delia dan koleganya sebagai pengembang Teori Konstruktivis. Dalam teori ini, menurutnya individu menafsirkan dan bertindak terhadap realitas berdasarkan kategori konseptual yang tersedia dalam pikirannya. Dalam pandangan teori konstruktivisme, “realitas tidak menghadirkan dirinya dalam bentuk kasar, tetapi lewat penyaringan” cara pandang seseorang di balik media massa itu menurut Littlejohn dan Foss (2009, dikutip dalam Jokomono, 2013, h.79).

Dalam konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama menurut Berger dan Luckman (1967, dikutip dalam Wulandari, 2013, h.29) yang digunakan sebagai alat narasi. Bahasa dianggap instrumen pokok untuk menceritakan sebuah realitas yang ada.

Namun, keberadaan bahasa ini tidak lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas, melainkan bisa menentukan gambaran mengenai suatu –realitas media—yang akan muncul di benak khalayak menurut DeFleur, Melvin, Ball-Rokeach (1975, dikutip dalam Hamad, 2002, h.11).

Abdullah (2009, dikutip dalam Jokomono, 2013, h.79) mengemukakan, terdapat tiga tindakan pekerja media manakala memandang suatu realitas. Pertama, memilih simbol yang yang bisa diekspresikan dalam bahasa. Kedua, memilih fakta yang akan menjadi menu sajian pemberitaan melalui strategi pengerangkaan. Ketiga, memutuskan seberapa luas pemberitaan ruang terhadap suatu peristiwa.

2.2.2 Konstruksi Sosial Media Massa

Banyak sarana komunikasi dan informasi yang dapat dimanfaatkan, seperti adanya media cetak dan internet. Sarana komunikasi tersebut akan terus berkembang sejalan dengan berkembangnya pemikiran manusia yang melakoni alam ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini menurut Ishak (2014, h.44).

Perkembangan sarana media komunikasi juga akan semakin canggih karena kemajuan teknologi yang didukung daya pikir manusia terhadap sarana penyebaran informasi bagi kepentingan masyarakat sendiri. Oleh karena itu, peranan media massa akan menjadi saluran yang penting. Kekuatan media massa

sebagai saluran untuk memengaruhi khalayak telah memberikan andil dalam pembentukan opini publik (Nugroho, 2013, h.3).

Konstruksi media dapat diartikan media massa memiliki teknik membuat susunan atau tata letak realitas menurut cara pandang masing-masing (Jokomono, 2013, h.79). Tidak semua realitas dijelaskan secara utuh dalam realitas media tanpa sentuhan penonjolan isu dari sang jurnalis di lapangan. Penjelasan ini sesuai dengan kasus yang dipilih penulis tentang masalah mekanisme pemilihan rais aam di muktamar PBNU ke-33 dalam Harian *Kompas* dan *Republika*.

James W. Carry dalam buku *Communications as Culture : Essays on Media and Society* via Muslich (1989, dikutip dalam Jokomono, 2013, h.79) mengemukakan, “Berita bukan informasi melainkan drama. Ia tidak mendeskripsikan dunia, tetapi memotret suatu arena yang berisikan aksi dengan kekuatan dramatik.”

Menurut Max (2013, h.35) tugas media tidak hanya menyampaikan informasi namun juga sebagai organisasi yang memegang peran penting dalam masyarakat.

Media adalah sebuah tempat yang mempunyai berbagai macam kepentingan dan dalam mencapai kepentingan tersebut media melakukan berbagai macam konstruksi realitas (Nugroho, 2013, h.3). Tentunya setiap media memiliki

pandangan yang berbeda dalam melihat sebuah kasus sebelum menjadikannya sebuah berita.

2.2.3 Analisis *Framing*

Konsep *frame* dikembangkan oleh Erving Goffman. Definisi Goffman tentang *frame* adalah skema interpretasi yang memungkinkan para individu menempatkan, memandang, mengidentifikasi dan memberi label pada sejumlah kejadian atau pengalaman hidup (1974, dikutip dalam Santi, 2012, h.220).

Framing dianggap memiliki dua makna utama. Pertama, makna yang merujuk pada cara di mana konten berita umumnya dibentuk dan diberikan konteks oleh jurnalis ke dalam kerangka rujukan yang familiar dan ada beberapa struktur makna yang tersembunyi. Kedua, khalayak dianggap mengadopsi kerangka rujukan yang ditawarkan oleh jurnalis dan untuk melihat dunia dengan cara yang serupa (Sobur, 2014, h.226).

Dalam lingkup internasional, *framing* memiliki fungsi untuk melakukan pemilihan isu-isu yang bisa disebut sebagai masalah internasional (*agenda setting*), identifikasi dan menjelaskan gangguan atau ancaman keamanan (*Cognitive Priming*), dan menawarkan beberapa solusi untuk menanganinya (*Evaluation*) (Norris, 2003, h.11).

Esensi *framing* adalah memilih beberapa fakta untuk menjadi prioritas seperti gambar, data atau perkembangan sebuah peristiwa untuk mempromosikan satu interpretasi pada sebuah kejadian (Norris, 2003, h.11).

Dengan segala *framing* yang dilakukan, masyarakat tidak begitu saja menerimanya. Tidak semua tema atau kejadian mampu memengaruhi sikap masyarakat. Ketertarikan masyarakat akan suatu isu (ekonomi, perang, politik, dan lainnya) dapat memengaruhi keberhasilan sebuah *framing* atau tidak (D'Angelo & Kuypers, 2010, h. 332).

Wartawan harus memutuskan apa yang akan ia beritakan. Apa yang diliput dan apa yang harus dibuang, apa yang di tonjolkan dan apa yang harus disembunyikan kepada khalayak.

Menurut Entman, terkadang hal itu membuat berita menjadi bias (kabur). Bias sendiri memiliki tiga konsep di antaranya: (D'Angelo & Kuypers, 2010, h. 335):

- a. *Content* bias: Berita terkadang hanya mementingkan satu sisi saja ketimbang memberikan penanganan yang sama pada dua sisi di sebuah konflik politik.
- b. *Distortion* bias: Terkadang ada berita yang diputarbalikkan atau memberikan realitas yang salah
- c. *Decision making* bias: Terkadang pengetahuan dan pikiran jurnalis itu sendiri yang sudah membuat sebuah berita menjadi bias (kabur)

Adanya *framing*, peristiwa yang sama dapat dilihat dengan cara yang berbeda oleh media, tergantung dari kacamata wartawan yang menulis berita. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal.

Khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol, hal yang tidak diberitakan akan dilupakan begitu saja oleh pembaca. Media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari suatu peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2002, h.77).

Dengan adanya *framing*, jurnalis mengemas peristiwa yang kompleks menjadi peristiwa yang dapat mudah dipahami, dengan perspektif tertentu dan lebih menarik perhatian khalayak (Eriyanto, 2002, h.80).

Tabel 2.2 Definisi Konsep *Framing*

Robert M. Entman	Adanya proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Terdapat juga empat perangkat untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan, yaitu adanya pemberian definisi, penjelasan definisi, evaluasi, dan rekomendasi
William A. Gamson dan Andre Modigliani	Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa. Cara bercerita itu berupa kemasan yang sudah

	terorganisir sedemikian rupa dari suatu peristiwa. Terdapat dua struktur di dalamnya, yaitu <i>core frame</i> dan <i>condensing symbols</i>
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki	Suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) ke dalam teks secara keseluruhan. Terdapat empat perangkat <i>framing</i> , yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Model ini berasumsi bahwa <i>frame</i> berfungsi sebagai pusat organisasi ide

(Santi, 2012)

Tiga model *framing* di atas memiliki kesamaan, yaitu membahas bagaimana media membentuk konstruksi atas realitas, menyajikannya lalu menampilkannya kepada khalayak.

Konsep *framing* yang dipilih penulis adalah Robert M. Entman karena kasus ricuhnya muktamar ke-33 PBNU tentang mekanisme pemilihan rais aam yang dipilih penulis sesuai dengan konsep dari Entman, yaitu adanya penonjolan aspek tertentu daripada aspek lain dan dalam analisis Entman terdapat penyelesaian masalah yang ditulis oleh media.

2.2.4 Media dan Agama

Digelarnya muktamar PBNU ke-33 untuk memilih ketua umum dan rais aam sangat mencuri perhatian media. Media ingin memberi info terhangat bagi khalayak. Ricuhnya muktamar PBNU ke-33 memberi kesempatan media untuk membingkai berita sesuai dengan kacamata wartawan. Namun, wartawan sering kali dihadapkan pada dilema pelik dalam situasi konflik. Disatu pihak, sering dituduh mengobarkan kebencian dan konflik melalui media; dilain pihak berkat para wartawan, orang mendapat informasi tentang suatu kejadian (Haryatmoko, 2007, h.85).

Menurut Syeirazi (2013, h.141) Indonesia adalah negeri berpenduduk mayoritas muslim yang mampu menyangdingkan Islam dan demokrasi dalam satu wadah. Wadah itu bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Namun, demokrasi yang dijelaskan bukan untuk memicu adanya konflik dalam suatu perkumpulan, apalagi di dalam organisasi masyarakat.

Dalam bidang agama, dilihat dari sisi positif, media dapat memperkaya hidup orang beragama dengan menyampaikan berita dan informasi tentang peristiwa, gagasan dan personalitas. Dari sisi negatif, media dan agama, keduanya memiliki godaan. Media dapat menghapus dan memarginalisasi

gagasan dan pengalaman religius. Sedangkan agama dapat selalu melihat media secara negatif (Krisyanto, 2010, h.262).

Dilihat dari sisi ormas terbesar di Indonesia, seharusnya NU tidak menjatuhkan agama Islam dengan kericuhan yang dibuat saat muktamar berlangsung. Dari kebutuhan akan sensasi, berita semacam kontroversial memang layak jual di pasaran. Redaksi tentu sudah tahu bahwa pertama-tama bukan kolom opini atau editorial yang membentuk opini masyarakat, tetapi berita (Haryatmoko, 2007, h.89).

2.2.5 Nahdlatul Ulama

Sebagaimana telah diuraikan di latar belakang penulis, bahwa topik utama yang dipilih adalah tentang Nahdlatul Ulama (NU). Oleh karena itu, penulis juga akan menjelaskan tentang NU. Menurut Zen (2001, h.1), tujuan awal berdirinya NU sebagai wadah bergabungnya para ulama dalam memperjuangkan “tradisi pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia”. NU dipenuhi oleh keinginan orang-orang pesantren untuk mendirikan suatu ikatan organisasi keagamaan Islam yang diharapkan menjadi wadah perjuangan dan pengembangan agama Islam dan keselamatan umat.

Didirikannya organisasi NU, yaitu untuk menegakkan ajaran Islam menurut faham *Ahlussunah waljama'ah* di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Khalimi, 2010, h.332). *Ahlussunah*

waljama'ah adalah golongan kaum muslim yang mengikuti ajaran dan perilaku Muhammad SAW. NU merujuk pada *Alquran*, Sunah Nabi Muhammad SAW, serta empat khalifah Islam.

Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Walisongo bukan sekedar mengajak masyarakat masuk Islam, tetapi juga mengubah struktur sosial masyarakat menuju tata sosial yang lebih adil, manusiawi dan juga berakar pada tradisi masyarakat setempat (Baso, 2006, h.387).

Dalam mendirikan NU, motivasi NU bukan hanya menangkal misi agama bangsa penjajah; Membangun semangat nasionalisme Indonesia; dan Membentengi ajaran Islam ala *Ahlussunah waljama'ah*, melainkan juga mengandung konsekuensi ketuhanan, yang berarti para pengurusnya harus amanah dan mampu mempertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhannya (Imron, 2012, h.117).

Menurut Baso (2006, h.387) warisan yang pernah dikembangkan oleh para Walisongo dalam mempersatukan masyarakat yaitu "*Man lâ syaikha lahu fasy-syaithânu syaikhun lahu*" (Siapa yang tidak punya guru, maka setanlah yang akan jadi gurunya).

Pada awal berdirinya, NU adalah organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial keagamaan dengan tokoh kiai sebagai pusatnya (Soon, 2008, h.2). NU berkembang begitu cepat merambah ke seluruh

pelosok tanah air. Figur kiai dan pesantren merupakan sentral dari keseluruhan proses perkembangan NU dengan segala dinamikanya (Imron, 2012, h. 98). Pola pendekatan penyebaran agama Islam yang tidak menggunakan cara perang atau kekerasan membuat agama Islam begitu pesat perkembangannya di nusantara dalam limit waktu yang tidak terlalu lama (Imron, 2012, h.88).

NU juga memiliki keinginan-keinginan agar bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Usaha organisasi NU untuk membangun masyarakat muslim menurut Khalimi (2010, h.333) ada empat, yaitu:

1. Bidang agama: Melaksanakan dakwah *Islāmiyah*, meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
2. Bidang pendidikan: Menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, dan berpengetahuan luas.
3. Bidang sosial budaya: Mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.
4. Bidang ekonomi: Mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat, dengan mengembangkan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

NU sebagai organisasi kemasyarakatan juga berperan sebagai *broker* antara rakyat dan pemerintah, karena itu NU dapat dikatakan sejajar peranannya dengan partai politik (Soon, 2008, h.220). Namun, NU tidak boleh dijadikan partai

karena dianggap sebagai organisasi sosial keagamaan. Tetapi NU membuat partai politik yang diharapkan dapat menampung aspirasi warga NU, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan 23 Juli 1998. NU dan PKB tampil ke depan membela komunitas-komunitas agama yang tertindas, seperti membela kehadiran *Darul Arqam*, komunitas *Syi'ah*, dan Ahmadiyah di Indonesia (Baso, 2006, h.389).

2.2.6 Muktamar

Berdasarkan buku *Panduan Acara Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama* yang dilaksanakan di Jombang, 1-5 Agustus 2015/ 16-20 Syawwal 1436, dengan mengusung tema “*Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia*”, muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, untuk membahas dan menetapkan:

1. Memutuskan masalah-masalah keagamaan (*masail diniyah*) baik bersifat *maudluyah* (tematik), *qonuniyah* (berkaitan dengan perundangundangan dan kebijakan pemerintahan) dan *waqi'iyah* (masalah yang terjadi di masyarakat)
2. Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
3. Menetapkan Garis-garis Besar Program Nahdlatul Ulama untuk 5 tahun

4. *Taushiyah* (rekomendasi) baik untuk internal *jam'iyah* maupun kepada masyarakat dan pemerintah, serta Pemilihan rais aam dan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pelaksanaan muktamar dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh PBNU, PWNU, dan PCNU. Muktamar dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Wilayah dan Cabang/Cabang Istimewa yang sah.

Sejak berdiri tahun 1926, Nahdlatul Ulama telah melaksanakan Muktamar sebanyak 33 kali, yaitu:

Tabel 2.3 Kegiatan Muktamar NU Tahun 1926-2015

No.	Kegiatan	Tahun	Tempat
1	Muktamar ke-1	1926	Surabaya
2	Muktamar ke-2	1927	Surabaya
3	Muktamar ke-3	1928	Surabaya
4	Muktamar ke-4	1929	Semarang
5	Muktamar ke-5	1930	Pekalongan
6	Muktamar ke-6	1931	Cirebon
7	Muktamar ke-7	1932	Cirebon
8	Muktamar ke-8	1933	Jakarta

9	Muktamar ke-9	1934	Banyuwangi
10	Muktamar ke-10	1935	Solo
11	Muktamar ke-11	1936	Banjarmasin
12	Muktamar ke-12	1937	Malang
13	Muktamar ke-13	1938	Banten
14	Muktamar ke-14	1939	Magelang
15	Muktamar ke-15	1940	Surabaya
16	Muktamar ke-16	1946	Purwokerto
17	Muktamar ke-17	1947	Madiun
18	Muktamar ke-18	1950	Jakarta
19	Muktamar ke-19	1951	Palembang
20	Muktamar ke-20	1954	Surabaya
21	Muktamar ke-21	1956	Medan
22	Muktamar ke-22	1959	Jakarta
23	Muktamar ke-23	1962	Solo
24	Muktamar ke-24	1967	Bandung
25	Muktamar ke-25	1971	Surabaya
26	Muktamar ke-26	1979	Semarang
27	Muktamar ke-27	1984	Situbondo
28	Muktamar ke-28	1989	Yogyakarta
29	Muktamar ke-29	1994	Tasikmalaya

30	Muktamar ke-30	1999	Kediri
31	Muktamar ke-31	2004	Solo
32	Muktamar ke-32	2010	Makassar
33	Muktamar ke-33	2015	Jombang



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.3 Kerangka Pemikiran

